

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi, dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMKM Kota Surabaya) dalam Peningkatan Kepemilikan Legalitas Usaha yang dianalisis melalui model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam (1993), diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada evaluasi *context*, Program Pesona Buaya dilaksanakan sebagai respons terhadap rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai legalitas usaha, perubahan sistem perizinan dari SIUP menjadi NIB, keterbatasan literasi digital dalam penggunaan OSS, serta persepsi bahwa perizinan rumit dan berbiaya. Dalam menjawab permasalahan tersebut, DPMPTSP Kota Surabaya merancang program melalui sosialisasi, pendampingan, sinergi pelayanan legalitas usaha, dan pelayanan jemput bola yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, berdasarkan evaluasi *context*, Program Pesona Buaya memiliki relevansi yang tinggi karena tujuan dan strategi pelaksanaannya telah sesuai dengan kebutuhan serta kondisi aktual pelaku UMKM di Kota Surabaya.
2. Pada evaluasi *input*, Program Pesona Buaya didukung oleh sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan koordinasi lintas sektor yang memadai. Meskipun terdapat keterbatasan personel dan belum adanya anggaran

khusus pada awal pelaksanaan, DPMPTSP Kota Surabaya mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta bersinergi dengan DPRD Kota Surabaya Komisi B untuk mendukung pembiayaan sosialisasi. Dengan demikian, aspek *input* telah mendukung pelaksanaan program dalam meningkatkan kepemilikan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kota Surabaya.

3. Pada evaluasi *process*, Program Pesona Buaya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan SOP melalui koordinasi, pendataan, sosialisasi, pendampingan pengurusan NIB, serta sinergi dengan berbagai *stakeholder*. Pelaksanaan program meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dan mempermudah pengurusan legalitas usaha. Meskipun menghadapi kendala pada sistem OSS, akun pengguna, dan rendahnya minat sebagian UMKM, DPMPTSP Kota Surabaya melakukan tindak lanjut sehingga program tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, aspek *process* dalam Program Pesona Buaya dapat dinilai telah terlaksana secara efektif dan mendukung pencapaian tujuan peningkatan kepemilikan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kota Surabaya.
4. Pada evaluasi *product*, Program Pesona Buaya berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta jumlah kepemilikan NIB. Legalitas usaha juga memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan, akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, e-Peken, pameran, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sekaligus mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas lanjutan. Selain bermanfaat bagi pelaku UMKM, program turut mendukung pendataan, pembinaan, dan terciptanya iklim usaha

yang lebih legal di Kota Surabaya. Dengan demikian, aspek *product* dalam Program Pesona Buaya telah berhasil memenuhi kebutuhan pelaku UMKM dan menghasilkan dampak positif yang mendukung pengembangan usaha serta peningkatan daya saing UMKM di Kota Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dianalisis serta kesimpulan yang telah dirumuskan mengenai Evaluasi Program Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi, dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMKM Kota Surabaya) dalam Peningkatan Kepemilikan Legalitas Usaha, maka diajukan saran sebagai bahan masukan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan program yaitu sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kota Surabaya disarankan memperkuat edukasi kepada pelaku UMKM terkait pengelolaan akun *Online Single Submission* (OSS) melalui sosialisasi maupun pendampingan, khususnya mengenai penggunaan e-mail, nomor telepon aktif, pembaruan data akun, serta prosedur pemulihan akun. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kendala teknis yang sering menghambat proses pelayanan perizinan.
2. DPMPTSP Kota Surabaya disarankan menyusun basis data kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terpetakan berdasarkan wilayah, seperti kecamatan dan kelurahan secara berkala. Ketersediaan data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengidentifikasi wilayah yang masih memiliki tingkat kepemilikan NIB rendah sehingga pelaksanaan Program Pesona Buaya dapat diarahkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.